

Kesiapan Lembaga Taman Kanak-Kanak Dalam Menerapkan Program Layanan Pendidikan Inklusi

Lani Nopianti

Universitas Pendidikan Indonesia
Email: nopiantilani@student.upi.edu

ABSTRAK

Program layanan pendidikan Inklusif adalah program pemerintah yang telah digaungkan dalam beberapa tahun terakhir. Program layanan pendidikan inklusif ini merupakan upaya pemerataan kesempatan pendidikan, program inklusi juga merupakan strategi yang mengakomodir semua keragaman potensi siswa. Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif ada beberapa hal yang harus dipersiapkan: Para siswa, manajemen, pendidik dan kurikulum. Mengacu pada pemaparan, penulis bermaksud untuk meneliti kesiapan lembaga TK dalam menyelenggarakan program pelayanan pendidikan yang inklusif. Metode dalam hal ini adalah ulasan literatur yang bersumber dari situs online, buku dan peneliti sebelumnya.

Kata kunci: Program Layanan Pendidikan Inklusif (PPI), Kesiapan, Taman Kanak-Kanak.

ABSTRACT

The Inclusive education service program is a government program that has been echoed in recent years. This inclusive education service program is an effort to equalize educational opportunities, inclusion program is also a strategy that accommodates all the diversity of students' potential. In the implementation of inclusive education programs there are several things that must be prepared: Students, management, educators and curriculum. Referring to the exposure, the author intends to examine the readiness of kindergarten institutions in organizing an inclusive education service program. The method in this case is a review of literature sourced from online sites, books and previous researchers.

Keywords: *Inclusive Education Services Program (PPI), Readiness, Kindergarten.*

A. PENGANTAR

Anak-anak adalah aset untuk masa depan, baik anak normal maupun alami berkebutuhan khusus, baik pria Anak maupun perempuan dalam berbagai kondisi berkebutuhan khusus memiliki hak dan

kewajiban yang sama dalam pendidikan untuk menentukan arah sebuah bangsa (Patel, 2010). Satu abad yang lalu anak-anak berkebutuhan khusus tidak menerima pendidikan, maka ketika ada kebijakan untuk pendidikan mereka terpisah dari

rekan-rekan mereka, tetapi sekarang kita terbiasa melihat anak-anak berkebutuhan khusus di kelas yang sama dengan anak-anak biasa (Dewan Gubernur Minnesota , 2007).

Kebijakan untuk menyediakan lingkungan yang sama antara anak-anak biasa dan anak-anak berkebutuhan khusus dalam wadah yang disebut pendidikan inklusif , upaya pendidikan inklusif telah digaungkan oleh PBB dengan berbagai kegiatan dan perjanjian seperti Deklarasi Hak-Hak Orang Cacat (1975), Konvensi Hak Anak (1989) , Konferensi Dunia Pendidikan Berkebutuhan Khusus di Salamanca-Spanyol (1994). Perjanjian global ini sangat mempengaruhi negara berkembang seperti Indonesia.

Pendidikan inklusif dapat didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama (Stainback dan Sianback,1990) . Sistem tersebut memungkinkan siswa berkebutuhan khusus yang tidak mengalami disabilitas intelektual untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah reguler (Sapon-Shevin ,Unesco 2003) karena hakikatnya bahwa semua siswa dengan ragam potensi

individu,sosial dan intelektual berhak mencapai potensi mereka (Baihaqi dan Sugiarmn,2006).

Dalam PERMEN NO.70 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif ini bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman.

Kemendikbud Dirjen PAUD (2013) menerangkan bahwa Inklusi adalah program layanan PAUD reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan layanan PAUD reguler dan layanan anak berkebutuhan khusus dalam program yang sama. Dengan penekanan pada reorganisasi sekolah reguler untuk menjadi suatu komunitas yang mendukung semua pemenuhan kebutuhan khusus setiap siswa. Hal ini merupakan salah satu karakteristik sekolah inklusif dengan komunitas yang terpadu, peduli, menerima dan responsif

terhadap kebutuhan setiap individu (Sunardi, Maryadi, & Sugini, 2014).

Pada teknisnya pelayanan pendidikan inklusi masih terdapat kendala, seperti penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Salamah dari UNY Yogyakarta menyoroti tentang kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus pada jenjang SD. Dari hasil penelitian beliau dapat disimpulkan bahwa guru kelas kurang siap menangani anak berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya pengetahuan bagaimana cara penanganannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Shareefa (2016) di Maldives dengan judul *“Institutional and teacher readiness for inclusive education in schools of Hithadhoo, Addu Maldives: a study of the perceptions of teachers”*, yang menyoroti kesiapan lembaga dan guru untuk program inklusi. Dalam penelitiannya menyoroti tentang bagaimana keyakinan, persepsi dan perasaan guru tentang kesiapan institusinya. Dari hasil penelitian beliau didapatkan kesimpulan bahwa para guru menyambut baik program layanan inklusi yang diselenggarakan lembaganya namun dalam teknisnya terdapat kendala, seperti: kurangnya pengetahuan dan kemampuan menangani anak dengan berkebutuhan, kurangnya fasilitas yang mendukung,

kurangnya perhatian dari para stakeholders, juga permasalahan tentang kurikulum untuk program layanan inklusif.

Beberapa penelitian diatas terkait kesiapan lembaga dalam layanan pendidikan inklusi belum begitu banyak khususnya dalam ranah Pendidikan Anak Usia Dini , karenanya penulis tertantang untuk mengulas hal tersebut dan menjadi bahan kajian dalam tesis

B. KESIAPAN

Kesiapan menurut kamus psikologi adalah titik kedewasaan untuk menerima dan mempraktikkan perilaku tertentu. Menurut Slameto (2010) kesiapan itu adalah kondisi seseorang secara keseluruhan yang membuatnya siap merespons dengan cara tertentu terhadap sebuah situasi. Mengacu pada pemahaman di atas semua mengarah pada individu atau pribadi, tetapi dalam penelitian ini penulis mengarahkan kesiapan bukan kepada individu tetapi lembaga, di mana lembaga yang saya maksud adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini formal atau apa yang kita ketahui dengan taman kanak-kanak.

C. PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI TAMAN KANAK-KANAK

Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan, pendidikan anak usia dini sebagai upaya pembinaan yang mengacu pada anak sejak lahir hingga enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan jasmani dan rohani sehingga anak-anak memiliki kesiapan untuk masuk pendidikan lanjutan.

Menurut Niland pakar inklusi Sydney University (tkplb.kemdikbud.go.id, 2017) bahwa terdapat beberapa manfaat penerapan pendidikan inklusi di TK, yaitu: anak akan belajar semua aspek keterampilan lewat interaksi, anak reguler akan terstimulasi sikap empati dan memahami keragaman/perbedaan, akan terjalin ikatan rasa memiliki yang kuat.

Menurut Ackah (2016) bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus laju perkembangan otaknya sama dengan anak reguler yaitu tergantung pada stimulasi dini yang diberikan oleh lingkungan. Di PAUD semua anak berkesempatan untuk bermain, eksplorasi langsung dan belajar dalam pengaturan PAUD, hal semacam ini dapat meningkatkan kemampuan anak-anak untuk mengembangkan keterampilannya,

seperti interaksi sosial dan bersabar (Evans et al.,2002).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa melalui pemberian stimulus pendidikan sejak usia dini, aspek perkembangan anak akan sangat siap untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak biasa tetapi juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut Smith (1998) efek yang paling berlangsung adalah yang dilakukan dalam periode kritis atau sensitif, yaitu pada anak usia dini. Dan pendidikan anak usia dini baik dari jalur formal seperti taman kanak-kanak (TK) maupun dari saluran nonformal seperti Kober, SPS dan lainnya berperan penting dalam membantu mengembangkan hal ini.

Pemerintah telah merancang prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif . Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 10) prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan kualitas Kemampuan baik secara ekonomi, geografis maupun aspek lain dari beragam masyarakat akan sangat terbantu dengan prinsip ini.

2. Prinsip keberagaman dalam potensi atau karakteristik setiap siswa harus dihargai dan menjadi hal utama yang perlu dikembangkan
3. Prinsip makna lingkungan masyarakat yang menghargai keberagaman dan menerima perbedaan akan menjadi mahasiswa sehingga membantu mengembangkan kemandirian dalam pendidikan yang bermakna.
4. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif keberlanjutan diselenggarakan secara berkesinambungan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan
5. Prinsip keterlibatan Untuk keberhasilan yang optimal, semua komponen masyarakat terlibat dalam pendidikan inklusif.

Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2008: 6-9) merancang Komponen pendidikan inklusif sebagai berikut:

1. Manajemen siswa adalah komponen utama dalam pendidikan inklusif. Masuk terdiri dari siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus termasuk
 - a. Siswa dengan gangguan penglihatan
 - b. Siswa dengan gangguan pendengaran
 - c. Siswa dengan gangguan bicara
 - d. Siswa dengan gangguan fisik
 - e. Siswa penyandang disabilitas belajar
 - f. Siswa dengan gangguan pembelajaran lambat
 - g. Siswa dengan defisit perhatian
 - h. Siswa cerdas khusus
 - i. Siswa bakat khusus
 - j. Siswa yang memiliki kebutuhan sosial khusus

2. Manajemen kurikulum

Kurikulum bagi penyedia pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional yang merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang digunakan dalam kelas inklusif adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Tarmansyah, 2007: 169).

Tarmansyah (2007: 154) menjelaskan bahwa sekolah harus mengadaptasi kurikulum dengan bakat dan potensi siswa. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Duplikasi kurikulum
- b. Modifikasi kurikulum
- c. Substitusi kurikulum

d. Omisi Kurikulum

3. Manajemen staf pendidik

Dalam teknis pelaksanaan pendidikan inklusif di kelas terdapat tiga guru termasuk guru kelas, guru instruktur dan guru pendampingan khusus. Mudjito, dkk (2012: 54) juga menyarankan bahwa kompetensi guru yang inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus, dan mendidik siswa berkebutuhan khusus dalam jenis tertentu dalam bentuk:

- a. Mengembangkan instrumen penilaian pendidikan khusus
- b. Melaksanakan bantuan untuk pendidikan berkebutuhan khusus,
- c. Memberikan bantuan layanan khusus
- d. Memberikan bimbingan berkelanjutan bagi siswa berkebutuhan khusus
- e. Memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus

4. Pengelolaan infrastruktur

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam keberlanjutan pembelajaran bermakna. Penyedia pendidikan Inklusif harus menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan belajar anak reguler dan berkebutuhan khusus dengan optimal dan tepat, misalnya:

buku pelajaran berupa braille, buku audio atau buku bicara bagi siswa tunanetra.

5. Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif, akan banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi.

6. Pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mengoptimalkan program tersebut perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak, yaitu: sekolah, masyarakat dan pemerintah. Sekolah harus mengacu pada pemerintah dalam kebijakan yang digulirkan dan juga perlu kolaborasi dengan masyarakat agar masyarakat tahu bahwa mereka membantu melaksanakannya sehingga optimal.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan pada usia ini sangat penting dalam kehidupan anak karena pendidikan dini adalah modal dasar untuk perkembangan usia lebih lanjut. Kehadiran lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di jalur formal, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) dalam mendukung pendidikan pada usia ini sangat penting dalam kehidupan seorang anak karena pendidikan anak usia dini merupakan modal dasar untuk pembangunan di masa depan.

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal berupa taman kanak-kanak (TK) dalam

mendukung program pendidikan inklusif sangat penting, karena dengan keberadaan lembaga paud (TK) maka pelaksanaan layanan program anak berkebutuhan khusus juga dapat dirangsang sejak dini. Agar potensi anak berkebutuhan khusus dapat dirangsang secara optimal seperti anak reguler lainnya, lembaga PAUD (TK) perlu mengetahui apa yang harus dipahami dan dilaksanakan, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam kesiapan lembaga PAUD (TK) dalam membuka program pendidikan inklusif .

Sarana prasarana, kompetensi guru dan kurikulum untuk layanan pendidikan inklusif masih sangat belum optimal, karenanya semua stakeholder harus berperan dalam mensukseskan layanan inklusif ini. Artikel ini masih jauh dari sempurna maka dari itu, Penulisan dengan tema serupa diharapkan dapat dilanjutkan kembali oleh penulis yang lain agar menambah referensi lebih banyak.

F. REFERENSI SUMBER

Ackah-Jnr, F. R. (2016). *Implementation of inclusive early childhood education Policy and Change in Ghana: Four case sites of practice*. Griffith University

Baihaqi MIF & M.Sugiarmn.(2006). *Memahami dan membantu anak ADHD*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusi; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional.

Evans, J., & Lunt, I. (2002). Inclusive education: Are there limits?. *European Journal of Special Needs Education*, 17(1), 1–14.

Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Editor: Wardi. Jakarta: Baduose Media.

Patel,JV (2010). *Human rights education : Inclusion in the curriculum at teacher education*. *Edutracks* 9 (3), 50.

Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan memiliki potensi istimewa*.

Shareefa, M. (2016). Institutional and teacher readiness for inclusive education in schools of Hithadhoo, Addu Maldives: a study of the perceptions of teachers. *International Journal of Scientific and Technology Research*, vol.5@2016.

- Slameto. (2010). *Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Smith,D,J (1998), *Inclusion,school for all students*, Wadsworth Publishing Company.
- Stainback,W. & Sianback,S. (1990). *Support Networks for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H.Brooks
- Sunardi (2010), *Kurikulum Pendidikan Luar Biasa di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional
- Tarmansyah. 2009. “Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusi)”. *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume IX No.1 April2009, hlm. 1 – 16.
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (1994) *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. New York: UNESCO.
- UNESCO, (2003), *Open File on Inclusive Education, Support Material for Managers and Administrators*; Unesco; France.